

KETERBUKAAN INFORMASI

DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NO. 17/POJK.04/2020 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN
KEGIATAN USAHA ("POJK 17/2020")

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertanggung jawab atas kelengkapan dan kebenaran seluruh informasi atau fakta material yang dimuat dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan bahwa informasi yang dikemukakan adalah benar dan tidak ada fakta material yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi ini menyesatkan.

Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 yang akan dilakukan oleh Perseroan adalah merupakan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.42/Pojk.04/2020 Tentang Transaksi Afiliasi Dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

PT PERDANA KARYA PERKASA TBK ("Perseroan")



Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang usaha Konstruksi

Kantor Pusat:

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1,
Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210 – Indonesia

Telpon: (021)-29181077

website: www.pkpk-tbk.co.id

email: corsec@pkpk-tbk.co.id

Jusuf Mangga Barani
Komisaris Utama

Suki
Komisaris

Sammy T.S Lamentik
Komisaris Independen



Haryanto Sofian
Direktur Utama

Untung Haryono
Direktur

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 1 November 2023

I. PENDAHULUAN

Merujuk pada Prospektus Penambahan Modal Dengan Memberikan HMETD I Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 4 Juli 2023 ("PMHMETD I"), Perseroan mengungkapkan salah satu rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi dana hasil PMHMETD I adalah sebesar Rp238.000.000 ribu yang dimana:

- a. sekitar 47,24% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal dalam rangka pengerjaan proyek yang saat ini sedang dilaksanakan oleh Perseroan dan persiapan pelaksanaan proyek baru yaitu pembelian peralatan alat berat dan unit pendukung, yang hingga saat ini seluruhnya atau 100% belum digunakan oleh Perseroan; dan
 - b. sekitar 43,48% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja dalam melaksanakan kegiatan usaha Perseroan dan tidak terbatas pada pembayaran beban subkontraktor (subkontraktor yang telah atau akan ditunjuk oleh Perseroan dan tidak terafiliasi dengan Perseroan), tenaga kerja, material, bahan bakar, serta biaya lain (termasuk biaya mobilisasi alat berat, biaya pengangkutan barang dan personil, dan biaya operasional lainnya) baik untuk proyek yang sedang berjalan maupun yang akan dilaksanakan, yang hingga saat ini belum digunakan oleh Perseroan sekitar 88,98%;
- sehingga terdapat sejumlah dana hasil PMHMETD I yang belum digunakan oleh Perseroan sebesar Rp204.514.200 ribu (selanjutnya disebut "**Dana Belum Digunakan**").

Atas Dana Belum Digunakan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I yang akan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015"). Untuk itu Perseroan berencana untuk meminta persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham ("**RUPS**") Perseroan atas rencana perubahan penggunaan dana tersebut yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2023.

Terkait dengan hal tersebut dan mengacu pada persetujuan pemegang saham atas rencana perubahan penggunaan Dana Belum Digunakan dalam RUPS, Perseroan berencana untuk menggunakan sebesar Rp165.000.000 ribu atau sekitar 80,68% (delapan puluh koma enam delapan persen) dari Dana Belum Digunakan untuk pembelian saham dari pihak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan termasuk dalam transaksi material sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020.

Dengan mengacu pada Pasal 24 POJK 42/2020, yang mengatur kewajiban Perseroan untuk memenuhi ketentuan POJK 17/2020 atas transaksi afiliasi yang nilainya memenuhi kriteria transaksi material, Perseroan dengan ini melakukan Keterbukaan Informasi dalam rangka memenuhi POJK 17/2020 sebagaimana dimaksud.

Rencana pembelian saham oleh Perseroan adalah sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam saham PT Bhakti Harapan Sejahtera ("**BHS**") yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara ("**DPB**") ("**Rencana Transaksi**").

DPB saat ini adalah pemegang saham pengendali secara langsung Perseroan. Dimana berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diterbitkan oleh PT Raya Saham Registra per tanggal 30 Oktober 2023, DPB memiliki 890.051.418 (delapan ratus sembilan puluh juta lima puluh satu ribu empat ratus delapan belas) saham atau 74,17% (tujuh puluh empat koma satu tujuh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan. Dengan demikian DPB selaku penjual dalam Rencana Transaksi adalah merupakan pemegang saham pengendali Perseroan (dimana dalam Rencana Transaksi selaku pembeli), sehingga Rencana Transaksi merupakan Transaksi Afiliasi.

Saat ini BHS memiliki entitas anak yaitu PT Tri Oetama Persada (“**TOP**”). Kepemilikan BHS pada TOP sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam TOP. TOP memiliki Izin Usaha Pertambangan – Operasi Produksi (IUPOP) atas 10.000 Ha (sepuluh ribu Hektare) tambang batubara.

Rencana Transaksi tidak mengakibatkan perubahan pengendali baik atas BHS maupun secara tidak langsung atas TOP.

Perseroan berencana akan melakukan Rencana Transaksi, dengan ketentuan sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, setelah memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan (“**RUPS LB**”) yang akan diselenggarakan pada tanggal 15 Desember 2023.

Hingga pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Perseroan dan perusahaan sasaran tidak memerlukan persetujuan, pemberitahuan atau perizinan terlebih dahulu dari kreditur, instansi berwenang dan/atau pihak lain sehubungan dengan Rencana Transaksi.

II. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA RENCANA TRANSAKSI

Atas Rencana Transaksi tersebut Perseroan memiliki penjelasan, pertimbangan, dan alasan sebagai berikut:

A. Penjelasan dilakukannya Rencana Transaksi

DPB selaku pemilik saham BHS (yang juga adalah pemegang saham pengendali Perseroan) telah mengetahui dengan baik kondisi BHS dan TOP sehingga proses pengkajian transaksi dan dampaknya terhadap Perseroan serta penentuan syarat dan kondisi transaksi dapat dilakukan dengan lebih mudah oleh Perseroan dibandingkan dengan perusahaan lain yang tidak memiliki hubungan afiliasi.

B. Pertimbangan dan Alasan

Manajemen Perseroan telah mempertimbangkan Rencana Transaksi dapat memberi kontribusi berupa peningkatan nilai investasi saham serta keuntungan dari investasi yang lebih baik untuk Perseroan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Perseroan menginginkan dapat memiliki sumber pendapatan usaha yang berkelanjutan melalui investasi pada Perusahaan Tambang yang akan memberikan kontribusi akan pertumbuhan pendapatan Perseroan di masa depan. Kondisi Perusahaan Tambang yang akan diakuisisi saat ini adalah dalam kondisi belum beroperasi namun diperkirakan dapat beroperasi secara komersial di akhir kuartal ke-4 (Q4) tahun 2023 dengan telah dimilikinya kuota produksi batubara tahun 2023 sebesar 1.000.000 (satu juta) ton yang dituangkan di dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) tahun 2023 yang telah disetujui oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
2. Memanfaatkan momentum koreksi harga komoditas batubara sehingga Perseroan dapat melakukan akuisisi saham dengan harga wajar dan ketika harga komoditas batubara mengalami pemulihan maka Perseroan akan mendapatkan efek positif. Perseroan sangat yakin bahwa harga komoditas batubara masih akan terus bergerak stabil dan cenderung menguat di kemudian hari mengingat permintaan yang masih sangat tinggi.

C. Pengaruh Rencana Transaksi terhadap kondisi keuangan Perseroan

Apabila rencana transaksi ini dilaksanakan maka total aset Perseroan mengalami kenaikan sebesar 5,02% (lima koma nol dua persen) dari posisi per 31 Juli 2023, terutama berasal dari penambahan Aset Pertambangan sebesar Rp162.252.835 ribu dan penambahan Aset Lain-lainnya sebesar Rp14.193.735 ribu.

Total liabilitas meningkat sebesar 140,12% (seratus empat puluh koma satu dua persen) dari posisi per 31 Juli 2023, terutama berasal dari penambahan Utang Lain-lain sebesar Rp222.533 ribu kepada pihak ketiga dan sebesar Rp67.168.239 ribu kepada pihak berelasi.

Total ekuitas menurun sebesar 21,74% (dua puluh satu koma tujuh empat persen) dari posisi per 31 Juli 2023, terutama berasal dari penurunan Tambahan Modal Disetor sebesar -Rp79.384.243 ribu karena selisih antara harga pengalihan BHS dengan nilai buku BHS.

III. URAIAN MENGENAI RENCANA TRANSAKSI

A. Objek Transaksi

Sehubungan dengan Rencana Transaksi, objek transaksi adalah sebanyak 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) saham atau sebesar **99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen)** dari seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam BHS yang dimiliki oleh DPB ("**Saham Yang Diambil Alih**").

Berikut merupakan keterangan mengenai BHS:

1. Riwayat Singkat BHS

BHS didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bhakti Harapan Sejahtera No.55 tanggal 19 Desember 2008, dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-99668.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 24 Desember 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0125400.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.40 tanggal 19 Mei 2019, Tambahan 13192

Anggaran Dasar BHS telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan terakhir berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bhakti Harapan Sejahtera No.39 tanggal 31 Agustus 2023, dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0059090.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 29 September 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 29 September 2023 dengan No.AHU-AH.01.03-0123717, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0193648.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 29 September 2023 ("**Akta 39/2023**").

BHS berdomisili di Grand ITC Permata Hijau Lantai 8, Suite B No.3.A Letjen Soepeno Arteri Permata Hijau, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

2. Kegiatan Usaha BHS

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Bhakti Harapan Sejahtera No.17 tanggal 29 Juni 2022, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0052968.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat masing-masing pada tanggal 28 Juli 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0271828 dan No.AHU-AH.01.09-0038028, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0146180.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 28 Juli 2022, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.079 tanggal 4 Oktober 2022, Tambahan No.034149; BHS bergerak dalam bidang perdagangan dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, BHS belum menjalankan kegiatan operasional.

3. Aset BHS

Harta kekayaan BHS saat ini adalah dalam bentuk investasi dalam saham pada entitas anak yaitu sejumlah 77.000 (tujuh puluh tujuh ribu) saham atau sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari seluruh modal yang telah ditempatkan dan disetor PT Tri Oetama Persada ("TOP"), selain kepemilikan saham tersebut saat ini BHS tidak memiliki harta kekayaan berupa hak atas tanah, bangunan, kendaraan bermotor, dan hak kekayaan intelektual.

TOP adalah suatu perseroan terbatas yang bergerak dalam bidang pertambangan batubara dan aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya, yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.

Entitas Anak	Status Operasi	Luas Lahan (Ha)	Total Cadangan (Ton)	Target Operasional
TOP	Persiapan Operasi Produksi (Mobilisasi dan Landclearing)	10.000	64.000.000	Akhir Kuartal 4 Tahun 2023

Berikut rincian aset pertambangan entitas anak BHS berdasarkan Laporan Keuangan yang telah diaudit per tanggal 31 Juli 2023:

(dalam Ribuan Rupiah)

No	Entitas Anak	Aset Pertambangan
1	TOP	162.252.835

Selain itu, rencana pengembangan proyek tambang batubara juga didukung adanya Laporan Sumber Daya dan Cadangan tambang batubara entitas anak BHS oleh Konsultan Independen PT Runge Pincock Minarco tertanggal 25 September 2023, yang mana penilaian tersebut dilakukan berdasarkan standar penilaian yang ditetapkan oleh KCMI dan dilakukan oleh Competent Person yang terdaftar di KCMI yaitu Gamet Nugroho selaku CPI Sumberdaya dan Lukman El Hakim selaku CPI Cadangan.

Penggunaan Laporan Sumber daya dan cadangan tambang batubara entitas anak BHS telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20 (2) POJK No. 35/2020.

4. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham BHS

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BHS saat ini adalah berdasarkan Akta 39/2023, yaitu sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp10.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	15.000.000	150.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
DPB	14.991.000	149.910.000.000	99,94%
PT Deli Pratama Nusantara	9.000	90.000.000	0,06%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	15.000.000	150.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

5. Pengurusan dan Pengawasan BHS

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BHS pada saat keterbukaan informasi ini adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Bhakti Harapan Sejahtera No.10 tertanggal 21 Oktober 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 22 Oktober 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0463568 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0183288.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Komisaris : Suki
Direktur : Haryanto Sofian

6. Ikhtisar Data Keuangan Penting BHS

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting konsolidasian BHS dan Perusahaan Anak-nya yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Konsolidasian Interim BHS per 31 Juli 2023 dan pada tanggal 31 Desember 2022 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Kiman Mustika Karta, CPA, CA, ACPA, CPA (Aust), CTC, CTA, MAPPI (Cert), CRGP.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)	
	31 Juli	31 Desember
	2023	2022
Jumlah Aset	179.641.288	145.513.453
Jumlah Liabilitas	67.544.114	33.221.498
Jumlah Ekuitas	112.097.174	112.291.955

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Juli	
	2023	2022*
Pendapatan	-	-
Beban Usaha	-242.361	-261.014
Laba Usaha	-242.361	-261.014
Laba sebelum pajak penghasilan	-194.781	-222.071
Laba bersih tahun/periode berjalan	-194.781	-222.071
Laba Komprehensif tahun berjalan	-194.781	-222.071

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2023	2022*	2022
Rasio Usaha (%)			
Rasio Laba Terhadap Ekuitas (ROE)	-0,17	-0,20	-0,42
Rasio Laba Terhadap Aset (ROA)	-0,11	-0,17	-0,33
Marjin Laba Bersih (NPM)	0,00	0,00	0,00
Rasio Keuangan (x)			
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	0,02	0,12	0,06
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas (DER)	0,60	0,17	0,30
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (DAR)	0,38	0,14	0,23
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,00	0,00	0,00

*) Tidak diaudit

7. Keterangan Singkat mengenai Entitas Anak

Berikut merupakan keterangan mengenai Entitas Anak BHS:

PT Tri Oetama Persada ("TOP")**a. Umum**

TOP didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Tri Oetama Persada No.7 tanggal 27 September 2006, dibuat di hadapan Raden Adjeng Veronica Soelarsi Dijah Retno Lestari, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-61931.AH.01.01.Tahun 2008 tertanggal 12 September 2008, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0083364.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 12 September 2008, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.80 tanggal 3 Oktober 2008, Tambahan No.19299.

Anggaran dasar TOP telah mengalami beberapa kali perubahan, dimana perubahan anggaran dasar TOP terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Tri Oetama Persada No.17 tanggal 19

September 2023, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan No.AHU-0056775.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 20 September 2023, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 20 September 2023 dengan No.AHU-AH.01.09-0165049, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0186256.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 20 September 2023, mengenai perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar TOP mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan bidang usaha TOP sesuai dengan KBLI 2020 ("**Akta 17/2023**").

b. Kegiatan usaha TOP

Berdasarkan Akta 17/2023 maksud dan tujuan TOP ialah pertambangan dan penggalan, pengangkutan dan pergudangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, TOP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a) Menjalankan usaha-usaha di bidang Pertambangan dan Penggalan:
Pertambangan Batu Bara, mencakup usaha operasi pertambangan, pengeboran berbagai kualitas batubara seperti antrasit, bituminous dan subbituminous baik pertambangan di permukaan tanah atau bawah tanah, termasuk pertambangan dengan cara pencairan (liquefaction). Operasi pertambangan tersebut meliputi penggalian, penghancuran, pencucian, penyaringan dan pencampuran serta pemadatan untuk meningkatkan kualitas atau memudahkan pengangkutan dan penyimpanan/penampungan. Termasuk pencairan batu bara dari kumpulan tepung bara (culm bank) (dimasukan dalam kelompok 05100).
- b) Menjalankan usaha-usaha di bidang Pengangkutan dan Pergudangan:
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Laut, mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya Pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan Kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan (dimasukkan dalam kelompok 52221);
 - Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau, mencakup kegiatan usaha penyelenggaraan pelabuhan sungai dan danau. Termasuk kegiatan yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan (dimasukan dalam kelompok 52222);
 - Angkutan Laut Perairan Pelabuhan Dalam Negeri Untuk Barang, mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut pada pelabuhan-pelabuhan yang belum memiliki fasilitas lengkap, dengan menggunakan angkutan perairan pelabuhan (redetransport) sebagai penghubung dari dermaga (pelabuhan) ke kapal atau sebaliknya, dari kapal utama ke kapal lainnya di perairan pelabuhan atau sebaliknya, dan/atau dari dermaga dan/atau kapal ke bangunan/instalasi di perairan laut atau sebaliknya (dimasukan dalam kelompok 50132).

Hingga saat ini TOP belum melakukan kegiatan operasional pertambangan dan diperkirakan akan memulai kegiatan operasional di akhir kwartal ke 4 tahun 2023.

Saat ini TOP telah memiliki perijinan penting yang diperlukan untuk kegiatan usaha pertambangan batubara yaitu:

No.	Jenis Ijin	Keterangan
1.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko NIB	No. 9120208700392 tertanggal 9 Juli 2019, dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS, KBLI No.05100 (Pertambangan batubara), dengan klasifikasi risiko tinggi. NIB berlaku selama TOP melakukan kegiatan usaha
2.	Ijin Usaha Pertambangan Operasi	No.267/DISTAMBEN Tahun 2011 Tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi PT Tri Oetama Persada tanggal 20 Juli 2011. Jangka waktu IUP adalah 20 Tahun. Jangka waktu Tahap Kegiatan adalah: Konstruksi selama 20 tahun (20 Juli 2011 s/d 19 Juli 2013) dan produksi selama 18 tahun (20 Juli 2013 s/d 19 Juli 2031)
3.	Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasional Produksi Batubara dan Sarana Penunjang	Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.36/1/PPKH/PMDN/2017 tanggal 2 Mei 2017 mengenai ijin pinjam pakai kepada TOP seluas 992,80 Hektar untuk jangka waktu hingga 19 Juli 2031.
4.	Ijin Lingkungan	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia No.SK.383/Menlhk/Setjen/PLA.0/7/2021 tanggal 12 Juli 2021 Tentang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Jalan Angkutan Tambang Dan Stockpile Atas Nama PT Tri Oetama Persada Seluas ± 308,27 Hektar Pada Kawasan Hutan Produksi Tetap Dan Hutan Produksi Yang Dapat Di Konversi Di Kabupaten Kapuas, Kabupaten Barito Utara, Dan Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jangka waktu hingga 19 Juli 2031. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kalimantan Tengah No.570/12/LH.IL/VII/DPMPTSP-2020 tentang Izin Lingkungan Pertambangan Batubara Dan Penambahan Fasilitas Stockpile Serta Jalan Angkutan Di Desa Buhut Jaya, Kecamatan Kapuas Tengah, Desa Batapah, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas Dan Desa Pepas, Desa Tumpang Laung, Kecamatan Montallat, Kabupaten Barito Utara Serta Desa Manterem, Desa Tarusan, Kecamatan Dusun Utara, Desa Tanjung Jawa, Desa Kalahien, Desa Pararapak, Dusun Danau Jutuh, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, atas nama PT Tri Oetama Persada tanggal 30 Juli 2020
5.	Sertifikat Clear and Clean	No.16/Bb/03/2013 tanggal 9 April 2013 dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Mineral dan Batubara.

c. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham TOP

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham TOP saat ini adalah berdasarkan Akta Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Tri Oetama Persada No.35 tanggal 30 Desember 2020, dibuat di hadapan Dian Fitriana, S.H., M.Kn., Notaris di Bekasi, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0004103.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021, diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 21 Januari 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0038281, didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0012270.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 21 Januari 2021 yaitu:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	110.000	110.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
BHS	77.000	77.000.000.000	70,00%
PT Bara Utama Sentosa	33.000	33.000.000.000	30,00%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	110.000	110.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

d. Pengurusan dan Pengawasan TOP

Susunan kepengurusan TOP pada saat Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah berdasarkan Akta 17/2023 yaitu:

Direktur : Helyuzar
Komisaris : Drs Gatot Eddy Pramono

8. Perkara

Sampai dengan diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini dan didukung oleh Surat Pernyataan BHS beserta TOP seluruhnya tertanggal 18 September 2023; BHS dan TOP tidak terlibat dalam perkara perdata maupun pidana di pengadilan negeri, perkara tata usaha negara di pengadilan tata usaha negara, sengketa yang tercatat di Badan Arbitrase Nasional Indonesia maupun badan-badan arbitrase lainnya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sengketa pajak di Pengadilan Pajak, perkara kepailitan dan PKPU di pengadilan niaga, sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara, perselisihan hubungan industrial, sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, tidak sedang menjadi pihak terlapor di hadapan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha Republik Indonesia dan BHS dan TOP tidak terlibat dalam kegiatan monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, serta tidak terdapat sengketa atau perselisihan yang berpotensi diajukan ke pengadilan dan/atau badan arbitrase atau somasi/klaim yang mungkin timbul dan dapat berdampak material terhadap BHS dan TOP serta Rencana Transaksi.

B. Pihak yang Melakukan Rencana Transaksi

Pihak Pembeli : Perseroan
Pihak Penjual : DPB

C. Hubungan dan Sifat Hubungan Afiliasi

Sifat hubungan afiliasi antara Pihak Pembeli dengan Pihak Penjual adalah sebagai berikut:

DPB selaku penjual dalam Rencana Transaksi adalah merupakan pemegang saham pengendali Perseroan selaku pembeli, sehingga transaksi jual beli saham dilakukan oleh dan antara pengendali Perseroan dengan Perseroan.

Transaksi tidak mengandung benturan kepentingan dan tidak merugikan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

D. Nilai Transaksi

Nilai transaksi atas akuisisi 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS sebagaimana termaktub dalam PPJB, adalah Rp165.000.000 ribu.

Keterangan Singkat Mengenai PPJB

1. Pihak

- Perseroan (Pihak Pertama)
- DPB (Pihak Kedua)

2. Pengikatan Jual Beli

- a. Penjual dengan ini setuju, segera setelah dipenuhinya seluruh syarat sebagaimana dimaksud di dalam PPJB ini, untuk menjual dan mengalihkan kepada Pembeli, dan Pembeli dengan ini setuju untuk membeli dan menerima penyerahan Saham Yang Dijual dari Penjual beserta seluruh hak dan keuntungan yang melekat padanya, bebas dari segala tuntutan dan jaminan ("**Transaksi**").
- b. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa Transaksi akan dilakukan dengan total harga jual beli Saham Yang Dijual yaitu sebesar Rp165.000.000 ribu ("**Harga Transaksi**").
- c. Penjual dan Pembeli sepakat bahwa untuk realisasi Transaksi, Para Pihak akan membuat dan menandatangani akta yang mengatur jual beli dan pemindahan hak atas seluruh Saham Yang Dijual di hadapan notaris ("**Akta Jual Beli Saham**") selambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah dipenuhinya seluruh Prasyarat dan Harga Transaksi akan ditransfer seluruhnya oleh Pembeli kepada Penjual (*in good funds*) pada hari yang sama dengan penandatanganan Akta Jual Beli Saham ("**Penyelesaian**").

3. Prasyarat

Pelaksanaan Transaksi bergantung pada dipenuhinya seluruh ketentuan dibawah ini:

- a. Persetujuan korporasi Penjual sesuai dengan anggaran dasar Penjual yaitu: persetujuan para pemegang saham Penjual guna menyetujui tindakan korporasi yang dilakukan Penjual dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar Penjual dan selambatnya harus dilaksanakan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal RUPS Perseroan;
- b. Rapat umum pemegang saham luar biasa Pembeli yang menyetujui rencana perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas I Pembeli dan rencana Transaksi yang dilakukan dengan memperhatikan POJK 30/2015 dan

POJK 17/2020 yang selambatnya harus dilaksanakan dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal ditandatanganinya PPJB yaitu tanggal 30 Oktober 2024 ("**RUPS Perseroan**");

- c. Rapat umum pemegang saham luar biasa BHS guna menyetujui rencana Transaksi, yang didahului oleh pengumuman di surat kabar sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan selambatnya harus dilaksanakan dalam jangka waktu 2 (dua) Hari Kerja terhitung sejak tanggal RUPS Perseroan;

Dalam PPJB tidak terdapat pembatasan-pembatasan yang merugikan hak-hak pemegang saham publik Perseroan.

Rencana Transaksi ini merupakan Transaksi Material bagi Perseroan dikarenakan persentase dari nilai transaksi dibagi total ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan Perseroan per 31 Juli 2023 yaitu Rp243.307.256 ribu adalah 67,82% (enam puluh tujuh koma delapan dua persen) sehingga melebihi dari 50% (lima puluh persen) dari ekuitas Perseroan, sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.

Dengan demikian, berdasarkan POJK 17/2020 Pasal 14 butir a, dalam hal terdapat Transaksi Material yang juga mengandung transaksi afiliasi, maka Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham independen melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**").

E. Manfaat Rencana Transaksi

Dengan adanya Rencana Transaksi Perseroan, maka secara konsolidasi prospek usaha Perseroan dapat meningkat dengan memanfaatkan peluang usaha atas kontribusi BHS dan entitas anaknya serta diharapkan dapat memperkuat struktur usaha dan kinerja Perseroan, untuk dimanfaatkan secara optimal bagi perkembangan Perseroan secara terarah dan berkesinambungan.

Setelah Rencana Transaksi menjadi efektif, dengan mempertimbangkan masih tingginya permintaan terhadap batubara sebagai kebutuhan bahan bakar utama pembangkit listrik, baik di pasar domestik maupun luar negeri di masa mendatang, maka diharapkan Perseroan dapat meningkatkan minat investor untuk melakukan investasi pada saham Perseroan, sehingga dapat meningkatkan likuiditas saham Perseroan dan memberikan nilai tambah bagi seluruh pemegang saham Perseroan.

IV. SUMBER PENDANAAN RENCANA TRANSAKSI

Sumber pendanaan untuk Rencana Transaksi akan berasal dari sebagian besar atau sekitar 80,68% (delapan puluh koma enam delapan persen) dari Dana Belum Digunakan hasil PMHMETD I Perseroan.

Atas Dana Belum Digunakan tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan perubahan rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I yang wajib dilakukan dengan memenuhi ketentuan Pasal 9 POJK 30/2015 yaitu wajib dimintakan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan.

V. KETERANGAN MENGENAI PARA PIHAK YANG MELAKUKAN RENCANA TRANSAKSI

A. Perseroan selaku Pembeli

1. Umum

Perseroan didirikan berdasarkan Perseroan didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Kaltim No.17 tertanggal 7 Desember 1983 juncto Akta Perubahan Turunan No.4 tertanggal 2 November 1985, keduanya dibuat di hadapan Laden Mering, S.H., Notaris di Samarinda, yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Keputusan No.C2-4475.HT.01.01.TH.86 tanggal 24 Juni 1986, dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.79 tanggal 3 Oktober 2006, Tambahan No.10611.

Anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.14 tanggal 2 Agustus 2023 dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Barat yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Republik Indonesia dan diterima dan dicatat dengan No.AHU-AH.01.03-0100914 tanggal 3 Agustus 2023 serta didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No.AHU-0148867.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Agustus 2023 ("**Akta14/2023**").

2. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan yang saat ini sedang dijalankan adalah dalam bidang konstruksi.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham Perseroan

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 Oktober 2023 yang dikeluarkan oleh PT Raya Saham Registra, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan mencapai 5% atau lebih adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp200,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	1.500.000.000	300.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
DPB	890.051.418	178.010.283.600	74,17%
Publik (kepemilikan < 5%)	309.948.582	61.989.716.400	25,83%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.200.000.000	240.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	300.000.000	60.000.000.000	

4. Pengurusan dan Pengawasan Perseroan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT Perdana Karya Perkasa Tbk No.250 tanggal 22 Desember 2021, dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 7 Januari 2022 dengan No.AHU-AH.01.03-0014357 dan didaftarkan dalam Daftar

Perseroan No.AHU-0004154.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 7 Januari 2022, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Jusuf Mangga Barani
 Komisaris Independen : Sammy Tony Saul Lamentik
 Komisaris : Suki

Direksi

Direktur Utama : Haryanto Sofian
 Direktur : Untung Haryono

5. Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan yang angkanya diambil dari Laporan Keuangan Interim Perseroan per 31 Juli 2023 dan 31 Desember 2022 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Juli 2023 dan 2022 (tidak diaudit) yang telah diaudit oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan berdasarkan standar audit yang ditetapkan IAPI, dengan opini wajar tanpa modifikasi tertanggal 27 Oktober 2023, yang ditandatangani oleh Putu Astika, CPA, CA.

Laporan Posisi Keuangan

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)	
	31 Juli 2023	31 Desember 2022
Jumlah Aset	291.512.073	71.631.767
Jumlah Liabilitas	48.204.817	60.980.287
Jumlah Ekuitas	243.307.256	10.651.480

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

Keterangan	(dalam Ribuan Rupiah)	
	31 Juli	
	2023	2022*
Pendapatan	37.234.680	13.295.699
Beban Pokok Pendapatan	(34.688.839)	(12.988.366)
Laba Kotor	2.545.841	307.333
Beban Usaha	(8.039.654)	(7.292.285)
Rugi Usaha	(5.493.813)	(6.984.952)
Rugi sebelum pajak penghasilan	(6.064.038)	(7.331.873)
Rugi bersih tahun/periode berjalan	(6.064.038)	(23.589.150)
Jumlah Rugi Komprehensif	(6.084.224)	(23.533.746)

*) Tidak diaudit

Rasio Keuangan Penting

Keterangan	31 Juli		31 Desember
	2023	2022*	2022
Rasio Usaha (%)			
Rasio Laba Terhadap Ekuitas (ROE)	-2,50	-142,82	-275,65
Rasio Laba Terhadap Aset (ROA)	-2,09	-39,90	-40,99
Marjin Laba Bersih (NPM)	-16,34	-177,00	-110,52
Rasio Keuangan (x)			
Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	10,30	0,92	0,83
Rasio Liabilitas terhadap Total Ekuitas (DER)	0,20	2,58	5,73
Rasio Liabilitas terhadap Total Aset (DAR)	0,17	0,72	0,85
<i>Interest Coverage Ratio (ICR)</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Debt Service Coverage Ratio (DSCR)</i>	0,00	0,00	0,00

*) Tidak diaudit

B. PT Deli Pratama Batubara selaku Penjual

1. Riwayat Singkat DPB

DPB didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 16 Agustus 2016, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M. Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No.AHU-0036503.AH.01.01.tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0095452.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 16 Agustus 2016 (“**Akta Pendirian**”).

Anggaran dasar DPB terakhir diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan No.AHU-0048227.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 8 September 2021 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No.92 tanggal 16 November 2021, Tambahan No.35678 (“**Akta 01/2021**”).

DPB berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat kantor di Grand ITC Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 3A, Jl. Letjen Soepono, Grogol Utara, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia, No. Telepon: (+62 21) 53664311 dan Faksimili: (+62 21) 53664366.

2. Kegiatan Usaha DPB

Berdasarkan Akta 01/2021, maksud dan tujuan DPB adalah bergerak dalam bidang usaha aktivitas perusahaan holding.

3. Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham DPB

Berdasarkan Akta Pendirian DPB, struktur permodalan dan susunan pemegang saham DPB adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000	1.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh :			
PT Deli Pratama Nusantara	9.999	999.900.000	99,99%
PT Sinar Deli	1	100.000	0,01%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	10.000	1.000.000.000	100,00%
Jumlah Saham dalam Portepel	-	-	

4. Pengurusan dan Pengawasan DPB

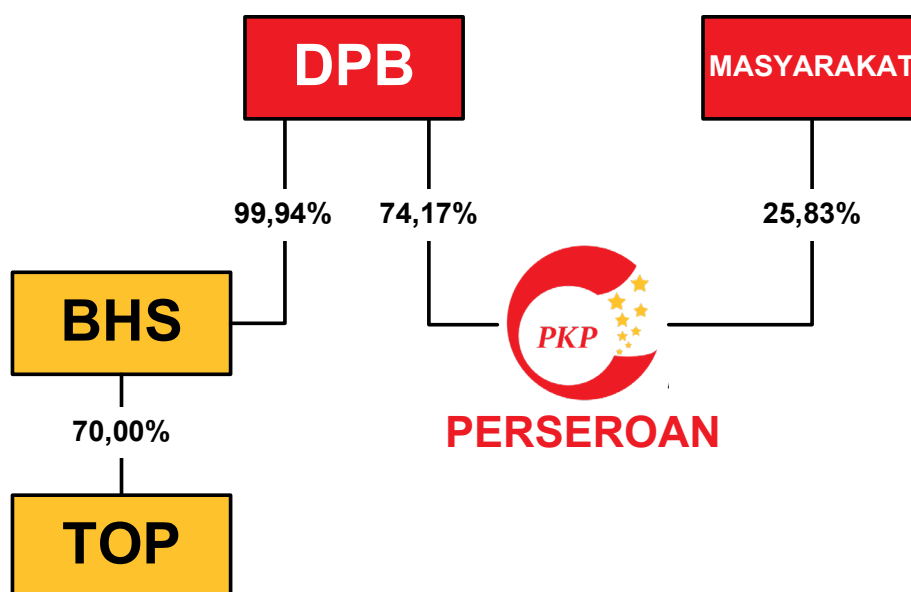
Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkular Pemegang Saham PT Deli Pratama Batubara No.01 tanggal 7 September 2021, dibuat di hadapan Yoke Reinata, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana telah diterima dan dicatat pada tanggal 8 September 2021 dengan No.AHU-AH.01.03-0445423 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No.AHU-0152758.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 September 2021, susunan Direksi dan Dewan Komisaris DPB yang menjabat pada tanggal Keterbukaan Informasi ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Komisaris : Suki
Direktur : Haryanto Sofian

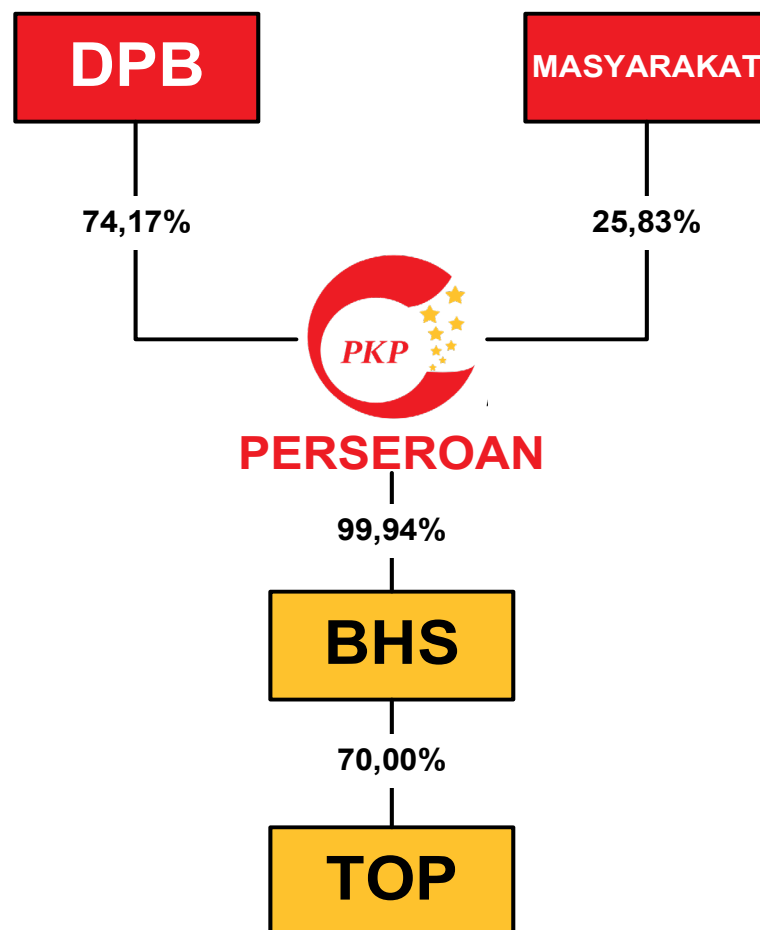
V. STRUKTUR SEBELUM DAN SETELAH AKUISISI

Berikut merupakan struktur kepemilikan Perseroan sebelum dan sesudah akuisisi:

A. SEBELUM AKUISISI



B. SETELAH AKUISISI



VI. PIHAK INDEPENDEN YANG TERLIBAT DALAM RENCANA TRANSAKSI

Pihak independen yang terlibat dalam Rencana Akuisisi Saham sebagai berikut:

- i. Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan ("**KAP JMM**") selaku auditor independen yang: (i) melaksanakan perikatan audit atas laporan keuangan konsolidasian historis Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini; dan (ii) menerapkan perikatan keyakinan memadai atas informasi keuangan konsolidasian proforma Perseroan tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 (tujuh) bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang tercantum dalam keterbukaan informasi ini.
- ii. KJPP Ferdinand Danar Ichsan & Partners ("**KJPP FDI&R**") selaku penilai independen untuk melakukan penilaian atas 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) saham BHS serta memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

VII. RINGKASAN PENDAPAT PIHAK INDEPENDEN

Perseroan telah menunjuk KJPP FDI&R sebagai penilai independen dalam penilaian terhadap 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh sembilan empat persen) saham BHS, berikut penyusunan pendapat kewajaran atas Rencana Transaksi.

KJPP FDI&R menyatakan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

Penilaian atas Saham TOP telah disusun sesuai dengan dan tunduk pada Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**POJK 35/2020**") dan Standar Penilaian Indonesia 2018 ("**SPI 2018**").

A. Ringkasan Penilaian Saham BHS

Berikut ringkasan penilaian saham yang disusun KJPP FDI&R dalam laporannya No. **00087/2.0176-00/BS/02/0213/1/X/2023** 30 Oktober 2023 ("**Laporan Penilaian Saham BHS**"):

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Akuisisi Saham

- PT Bhakti Harapan Sejahtera
- PT Tri Oetama Persada
- PT Perdana Karya Perkasa Tbk

2. Objek penilaian

Objek Penilaian dalam hal ini adalah 99,94% Ekuitas PT Bhakti Harapan Sejahtera dan penyertaan 70% ekuitas milik PT Bhakti Harapan Sejahtera di PT Tri Oetama Persada.

3. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian ini adalah untuk memberikan pendapat atas Nilai Pasar 99,94% saham PT Bhakti Harapan Sejahtera dan penyertaan 70% saham milik PT Bhakti Harapan Sejahtera di PT Tri Oetama Persada. Tujuan penilaian adalah untuk transaksi jual/beli.

Laporan penilaian ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal, dan tidak digunakan untuk di luar maksud dan tujuan penilaian tersebut, maupun penggunaan dalam tujuan lainnya. Dalam penilaian ini, bilamana dianggap perlu, penilai akan menggunakan bantuan dari luar maupun profesi lainnya.

Laporan penilaian ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal dengan mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.35/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal ("**POJK 35**") dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 17/SEOJK.04/2020 tentang Penilaian dan Penyajian Laporan penilaian Bisnis di Pasar Modal, serta Kode Etik Penilai Indonesia ("**KEPI**") dan Standar Penilaian Indonesia ("**SPI**") 2018.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

Asumsi

Kami menggunakan beberapa asumsi data yang mendukung pelaksanaan Penilaian yang berupa:

- a. Penggunaan nilai kurs Rp15.083 (per 31 Juli 2023)
- b. Perhitungan WACC (Weighted Average Cost of Capital) menggunakan angka sesuai dengan industry coal & related Energy berdasarkan Damodaran.

- c. Menggunakan beberapa data perusahaan pembanding yang diambil dari laporan keuangan perusahaan-perusahaan terbuka untuk mencari nilai perusahaan pembanding dan Capital IQ (S&P).
- d. Suku Bunga dan Tingkat Inflasi, menggunakan data dari SEKI-BI.

Kondisi Pembatas

- a. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.
- b. Kami berasumsi bahwa objek yang ditunjukkan kepada kami adalah benar merupakan objek dalam penilaian.
- c. Kami melakukan penelaahan atas dokumen yang digunakan dalam proses Penilaian, berupa akta pendirian, surat-surat perizinan usaha dan juga beberapa dokumen berupa informasi internal perusahaan.
- d. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
- e. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratan.
- f. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (fiduciary duty).
- g. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik.
- h. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI).
- i. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan serta kemampuan pencapaiannya.
- j. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan nilai akhir.
- k. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Obyek Penilaian dari Pembei Tugas.
- l. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
- m. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
- n. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
- o. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
- p. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dalam laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.

5. Pendekatan dan Metode Penilaian

Prosedur penilaian dilaksanakan dengan mengaplikasikan pendekatan dan metode penilaian usaha yang berlaku umum dalam penilaian Perusahaan atau ekuitas sesuai dengan **POJK 35/POJK.04/2020** dan **KEPI & SPI 2018**. Terdapat tiga pendekatan dalam penilaian usaha yang umum digunakan, yakni:

a. Pendekatan Pasar (Market Approach)

Pendekatan Pasar membandingkan perusahaan yang dinilai dengan perusahaan sebanding, kepentingan kepemilikan perusahaan dan surat berharga yang diperjualbelikan di pasar, serta transaksi relevan atas saham perusahaan yang sebanding. Transaksi sebelumnya atau penawaran atas komponen perusahaan juga dapat merupakan indikasi nilai **(SPI 330-5.23)**. Pendekatan Pasar adalah Pendekatan Penilaian dengan cara membandingkan objek Penilaian dengan objek lain yang sebanding dan sejenis serta telah tersedia informasi harga transaksi atau penawaran. **(POJK 35 Pasal 1.18)**

b. Pendekatan Pendapatan (Income Approach)

Pendekatan Pendapatan dapat digunakan untuk memperkirakan Nilai dengan mengantisipasi dan mengkuantifikasi kemampuan obyek penilaian dalam menghasilkan imbal balik (return), yang akan diterima dimasa datang **(SPI 330-5.25)**. Pendekatan Pendapatan adalah Pendekatan Penilaian dengan cara mengkonversi manfaat ekonomis atau pendapatan yang diperkirakan akan dihasilkan oleh objek Penilaian dengan tingkat diskonto tertentu. **(POJK 35 Pasal 1.19)**.

c. Pendekatan Aset (Asset Based Approach)

Indikasi nilai ekuitas atau estimasi Nilai Aset Bersih **(Net assets value)** diperoleh dari selisih antara nilai asset termasuk asset tak berwujud dengan nilai liabilitas, atas Dasar Nilai asset yang telah disesuaikan **(Appraised Value)** **(SPI 330-5.32)**. Pendekatan Aset adalah Pendekatan Penilaian berdasarkan laporan keuangan historis objek Penilaian yang telah diaudit, dengan cara menyesuaikan seluruh aset dan liabilitas menjadi Nilai Pasar sesuai dengan Premis Nilai yang digunakan dalam Penilaian Bisnis. **(POJK 35 Pasal 1.17)**

Pemilihan Pendekatan dan Metode Penilaian

Dengan mempertimbangkan data, informasi, maksud dan tujuan penilaian, serta kondisi Perusahaan, maka Pendekatan dan metode penilaian yang kami gunakan dalam penilaian ekuitas Perusahaan ditentukan berdasarkan kondisi usaha Perusahaan per tanggal penilaian. Pendekatan dan metode penilaian yang digunakan dalam menentukan indikasi nilai ekuitas Perusahaan adalah pendekatan pasar (Market Approach) melalui metode pembandingan perdagangan tercatat di bursa (Guideline Publicly-traded Comparable Method / GPTC), pendekatan berbasis pendapatan (*Income based approach*) melalui metode diskonto arus kas (*Discounted Cashflow/ DCF*) dan Pendekatan Aset (*Asset Based Approach*) melalui metode penyesuaian aktiva bersih. Pendekatan pasar digunakan untuk mengetahui pembandingan pasar di bursa efek dari skala usahanya. Pendekatan pendapatan digunakan dengan pertimbangan bahwa indikasi nilai ekuitas Perusahaan dicerminkan dari kemampuan perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa yang akan datang yang dapat diperkirakan, sebagaimana tergambar dalam rencana usaha /business plan yang disusun oleh manajemen Perusahaan TOP. Sementara pendekatan aset digunakan dengan pertimbangan bahwa perusahaan BHS belum melakukan aktivitas produksi atau belum beroperasi.

6. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan analisis dari semua data dan informasi yang KJPP FDI&R peroleh dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang relevan yang mempengaruhi

penilaian, dan mengacu pada hasil perhitungan dengan menggunakan metode penilaian yang digunakan, KJPP FDI&R berpendapat bahwa nilai Pasar Ekuitas 99,94% atas Saham BHS per 31 Juli 2023 adalah sebesar:

**Nilai Pasar
(pembulatan)**

Rp 170.658.682 ribu

(Seratus Tujuh Puluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Rupiah)

B. Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran

Berikut ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran yang disusun KJPP FDI&R dalam laporannya No. 00088/2.0176-00/BS/03/0213/1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 ("Laporan Pendapat Kewajaran BHS"):

1. Pihak-Pihak yang Terkait dalam Rencana Akuisisi Saham

Perseroan, BHS, dan DPB merupakan pihak yang terkait dalam rencana Akuisisi Saham.

2. Objek Pendapat Kewajaran

Obyek analisis kewajaran dalam hal ini adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana akuisisi saham PT Bhakti Harapan Sejahtera sebesar 99,94% (sembilan puluh sembilan koma sembilan empat persen) atau setara dengan 14.991.000 (empat belas juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu) Saham yang dimiliki oleh DPB.

3. Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran

Maksud pemberian pendapat kewajaran adalah untuk memberikan laporan hasil analisis tentang Kewajaran atas Rencana transaksi di Perusahaan Terbuka untuk akuisisi 99,94% saham PT Bhakti Harapan Sejahtera yang merupakan anak usaha PT Deli Pratama Batubara ke PT Perdana Karya Perkasa Tbk diperlukan dalam rangka memenuhi peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") d/h BAPEPAM-LK.

Tujuan pemberian pendapat kewajaran dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan perubahan Kegiatan Usaha atau No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan dan Kode Etik Penilai Indonesia ("KEPI"), serta Standar Penilaian Indonesia 2018 ("SPI 2018").

Laporan pendapat kewajaran ini digunakan untuk penggunaan di pasar modal, dan tidak digunakan untuk di luar maksud dan tujuan Pendapat Kewajaran tersebut, maupun penggunaan dalam tujuan lainnya. Dalam penugasan ini, bilamana dianggap perlu, penilai akan menggunakan bantuan dari luar maupun profesi lainnya.

4. Asumsi dan Kondisi Pembatas

1. Laporan penilaian ini bersifat non-disclaimer opinion.

2. Penilai Usaha telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya ke akuratannya.
4. Penilai menggunakan proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen.
5. Laporan Penilaian Usaha ini terbuka untuk publik.
6. Analisis, opini dan kesimpulan yang dibuat oleh penilai, serta laporan penilaian telah disusun sesuai dengan ketentuan Standar Penilaian Indonesia (SPI), Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI), serta POJK Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal.
7. Penilai Usaha bertanggung jawab atas Laporan Pendapat Kewajaran dan Kesimpulan Opini Akhir.
8. Nilai dicantumkan dalam satuan mata uang Rupiah dan/atau ekuivalennya atas permintaan pemberi tugas.
9. Semua sengketa dalam bentuk perkara pidana maupun perdata (baik di dalam maupun di luar pengadilan) yang berkaitan dengan obyek penilaian tidak menjadi tanggung jawab kami.
10. Kami ingin menekankan bahwa hasil kajian, analisis, serta tanggung jawab kami secara khusus hanya terbatas pada aspek nilai atas obyek penilaian, diluar dari aspek perpajakan dan hukum karena hal tersebut berada diluar lingkup penugasan kami.
11. Perubahan-perubahan yang dilakukan oleh pihak Pemerintah maupun swasta yang berkaitan dengan kondisi obyek penilaian, dalam hal ini kondisi pasar dan sebagainya bukan menjadi tanggung jawab kami.
12. Laporan penilaian ini disajikan hanya untuk maksud dan tujuan seperti tertulis di dala laporan dan tidak dapat digunakan untuk maksud dan tujuan lainnya dan kami tidak bertanggung jawab jika laporan ini digunakan untuk tujuan lain.
13. Laporan penilaian ini sebagai salah satu informasi untuk dijadikan dasar pemikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi tidak mengikat dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penentu suatu keputusan yang berakibat hukum, karena laporan pendapat kewajaran ini semata-mata dibuat berdasarkan kajian disiplin ilmu dan kemampuan yang kami miliki.
14. Laporan penilaian ini tidak berlaku dan tidak sah apabila tidak terdapat tanda tangan penilai berijin beserta stempel perusahaan (corporate seal) yang resmi dari KJPP FERDINAND, DANAR, ICHSAN DAN REKAN (FDI&R).
15. Laporan penilaian ini dibuat dan ditujukan hanya kepada pemberi tugas, sesuai dengan maksud dan tujuan yang diungkapkan dalam laporan penilaian.

5. Pendekatan dan Prosedur Pendapat Kewajaran

Dalam menyusun Laporan Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Transaksi yang mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis atas Rencana Transaksi;
- b. Analisis Kualitatif dan Kuantitatif atas Rencana Transaksi;
- c. Analisis Atas Kewajaran Rencana Transaksi.

6. Kesimpulan

Dengan mempertimbangkan analisis kewajaran atas Rencana Transaksi yang meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis inkremental serta analisis sensitivitas terhadap kinerja keuangan, menurut pendapat kami, Rencana Transaksi tersebut adalah **Wajar**.

C. Ringkasan Laporan Keuangan Proforma Perseroan

Laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan yang terdiri dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 serta, proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023.

Proforma laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi tersebut berasal dari proforma informasi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 yang telah direviu oleh KAP Johan Malonda Mustika & Rekan, auditor independen berdasarkan laporannya dengan No. 00139/2.0826/KP/03/0726-2/1/1/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023.

Beberapa kriteria yang digunakan sebagai dasar dalam mengkompilasi proforma informasi keuangan konsolidasian Perseroan yaitu sebagai berikut:

- a. Laporan Keuangan Perseroan per 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.
- b. Laporan Keuangan Konsolidasian BHS dan Entitas Anak per 31 Juli 2023 dan untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Johan Malonda Mustika & Rekan.
- c. Berdasarkan Akta No. 39 tanggal 31 Agustus 2023 dari Notaris Dian Fitriana, S.H., M.Kn., pemegang saham BHS menyetujui peningkatan modal dasar BHS dari Rp100.000.000 ribu menjadi Rp150.000.000 ribu dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp100.000.000 ribu menjadi Rp150.000.000 ribu. dengan asumsi dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.
- d. Transaksi material dan transaksi afiliasi atas akuisisi 14.991.000 lembar saham atau 99,94% kepemilikan pada BHS sebesar Rp165.000.000 ribu dengan asumsi dilakukan pada tanggal 31 Juli 2023.
- e. Transaksi akuisisi dilaksanakan berdasarkan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

Berikut adalah ringkasan laporan keuangan proforma konsolidasian Perseroan yang terdiri dari proforma laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Juli 2023 serta proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode 7 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2023 sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Laporan Posisi Keuangan	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Aset Lancar	252.856.473	(163.683.235)	89.173.238
Aset Tidak Lancar	38.655.600	178.324.523	216.980.123
Total Aset	291.512.073	14.641.288	306.153.361
Liabilitas Jangka Pendek	24.546.710	67.544.114	92.090.824
Liabilitas Jangka Panjang	23.658.107	-	23.658.107
Total Liabilitas	48.204.817	67.544.114	115.748.931
Total Ekuitas	243.307.256	(52.902.826)	190.404.430

(dalam Ribuan Rupiah)

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain	Sebelum Penyesuaian	Penyesuaian	Hasil Proforma
Pendapatan	37.234.680	-	37.234.680
Laba Bruto	2.545.841	-	2.545.841
Rugi Sebelum Pajak	(6.064.038)	(194.781)	(6.258.819)
Rugi Tahun Berjalan	(6.064.038)	(40.887)	(6.104.915)
Rugi Komprehensif Tahun Berjalan	(6.084.224)	(40.887)	(6.125.101)

Berikut adalah rincian penyesuaian yang terjadi sehubungan dengan Rencana Transaksi pengambilalihan 99,94% saham BHS yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara atau sebanyak 14.991.000 lembar dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- per saham, transaksi material dan transaksi afiliasi disertai dengan dasar transaksi yang mendasari penyesuaiannya sebagai berikut:

1. Perseroan melakukan pengambilalihan 99,94% saham BHS yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara atau sebanyak 14.991.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- per saham dengan harga pengalihan sebesar Rp 165.000.000 ribu.

Rincian penyesuaian dalam akun Kas dan Bank adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

Pengeluaran Kas Perseroan atas Pembelian 99,94% saham BHS	(165.000.000)
Kas dan Bank BHS (lihat point 2)	1.057.358
Total	<u>(163.942.642)</u>

2. Rincian penyesuaian masing-masing akun BHS dan Entitas anak adalah sebagai berikut:

(dalam Ribuan Rupiah)

ASET

ASET LANCAR

Kas dan Bank	1.057.358
Uang Muka dan Biaya Dibayar di Muka	259.407

ASET TIDAK LANCAR

Aset Tetap - Jumlah Tercatat	319.620
Aset Pertambangan	162.252.835
Goodwill	1.558.333
Aset Tidak Lancar Lainnya	14.193.735

LIABILITAS

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Utang Lain-lain:	
- Pihak Ketiga	222.533
- Pihak Berelasi	67.168.239
Utang Pajak	8.342
Beban Akrua	145.000

LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Beban Usaha	(242.361)
Pendapatan Keuangan	55.090
Lain-lain	(7.510)

3. Perseroan melakukan pengambilalihan 99,94% saham BHS yang dimiliki oleh PT Deli Pratama Batubara atau sebanyak 14.991.000 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp10.000,- per saham dengan harga pengalihan sebesar Rp 165.000.000 ribu.

Transaksi akuisisi atas saham BHS dicatat sesuai dengan PSAK 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku setiap transaksi restrukturisasi antara entitas sepengendali dibukukan dalam akun "Selisih Nilai Transaksi Entitas Sepengendali" sebagai bagian dari Tambahan Modal Disetor. Perhitungan selisih nilai transaksi entitas sepengendali atas akuisisi BHS adalah sebagai berikut:

dalam Ribuan Rupiah)

Harga Pengalihan	165.000.000
Nilai Buku BHS	85.615.757
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali	(79.384.243)

Rincian nilai Buku BHS adalah sebagai berikut:

dalam Ribuan Rupiah)

Modal Saham	100.000.000
Tambahan Modal Disetor	100.000
Saldo Rugi	(14.432.842)
Total Ekuitas	85.667.158
Bagian KNP (0,06% x Total Ekuitas)	51.401
Nilai Buku BHS	85.615.757

Rincian penyesuaian dalam akun Tambahan Modal Disetor adalah sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali Perseroan - BHS	(79.384.243)

4. Rincian penyesuaian atas akun Kepentingan Non Pengendali adalah sebagai berikut:

	(dalam Ribuan Rupiah)
Kepentingan Non Pengendali - Perseroan atas BHS (lihat point 3)	51.401
Kepentingan Non Pengendali - BHS atas TOP	26.430.016
Total	<u>26.481.417</u>

5. Penyesuaian atas proforma dampak transaksi restrukturisasi entitas sepengendali adalah atas Laba Komprehensif Tahun berjalan BHS sebesar 99,94% kepemilikan Perseroan di BHS dan atas Laba (Rugi) Komprehensif Tahun berjalan sebagai berikut:

			(dalam Ribuan Rupiah)
	% Kepemilikan	Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan	Penyesuaian
Perseroan atas BHS	99,94%	(153.996)	<u>(153.904)</u>

VIII. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

1. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa seluruh informasi material dan pendapat yang dikemukakan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ada informasi lainnya yang belum diungkapkan sehingga dapat menyebabkan pernyataan ini menjadi tidak benar atau menyesatkan.
2. Transaksi ini merupakan transaksi afiliasi namun tidak mengandung benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020. Dimana, Perseroan memiliki prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa transaksi afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

IX. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rencana Transaksi yang akan dilakukan Perseroan dalam Keterbukaan Informasi ini akan meminta persetujuan kepada para pemegang saham independen Perseroan dalam RUPSLB Perseroan yang rencananya akan diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 15 Desember 2023. Berikut merupakan tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan RUPSLB Perseroan:

No.	Keterangan	Hari	Tanggal
1.	Pemberitahuan Mata Acara RUPSLB ke OJK	Selasa	24 Oktober 2023
2.	Pengumuman RUPSLB	Rabu	1 November 2023
3.	Pengumuman Keterbukaan Informasi	Rabu	1 November 2023
4.	Tanggal Penutupan dalam Daftar Pemegang Saham (Recording Date)	Rabu	22 November 2023
5.	Pemanggilan RUPSLB	Kamis	23 November 2023
6.	RUPSLB	Jumat	15 Desember 2023
7.	Pengumuman Ringkasan Risalah RUPSLB	Selasa	19 Desember 2023
8.	Penyampaian Risalah RUPSLB ke OJK	Jumat	12 Januari 2024

X. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila Pemegang Saham membutuhkan informasi secara lengkap mengenai transaksi ini, dapat menghubungi Perseroan pada setiap hari dan jam kerja operasional Perseroan:

Corporate Secretary

The Bellezza Permata Hijau, Office Tower Lantai 15, 15 OF-1,
Jl. Letjen Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau, Grogol Utara, Kebayoran Lama
Jakarta Selatan 12210 – Indonesia

Telpon: (021)-29181077

website: www.pkpk-tbk.co.id

email: corsec@pkpk-tbk.co.id